

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
dinas PEMBERDAYAAN PEREMPUAN perlindungan anak
DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA

JL. MAJAPAHIT Telp. (0981) 21249

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA, KABUPATEN BIAK NUMFOR

NOMOR : 188.4 /02

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIP)

KABUPATEN BIAK NUMFOR

TAHUN 2021

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka perlu Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa untuk maksud sesuai dengan poin a diatas, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2021 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021;
 - c. bahwa mereka yang Namanya tercantum dalam surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas laporan tersebut;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah , sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2008 ;
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
 4. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintah.
 5. Kepmenpan Nomor 175 Tahun 2004 Tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.
 6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Revormasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2021;
- KEDUA : Nama-nama Tim sesuai dengan Diktum 1 adalah Terlampir
- KETIGA : Tim Penyusun Pelaksana sesuai dengan diktum 1 melaksanakan tugas Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2021 ;
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dari dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Rutin pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Biak Numfor ;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

Ditetapkan di : Biak
Pada Tanggal : 06 Januari 2022

PIC. KEPALA



DRS. LOURENS PATTIPEILOHY, M AP
Nip. 19640321 199302 1 005

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Biak Numfor
2. Inspektur Inspektorat Kab. Biak Numfor
3. Kepala BPKAD Kab. Biak Numfor
4. Lampiran Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

NOMOR : 188.4 /102 TAHUN 2022

PERIHAL : PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIP)
DP3AKB KAB. BIAK NUMFOR

| NO | NAMA/NIP | JABATAN | KETERANGAN |
|----|--------------------------------|------------------|------------|
| 1 | Drs. Laurens Pattipeilohy,M AP | Penanggung Jawab | |
| 2 | Yulianus Tonapa,SH | Ketua Tim | |
| 3 | Sietske Ronsumbre,SH | Anggota | |
| 4 | Ardi Yulianto SE | Anggota | |
| 5 | Handayani | Anggota | |

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KEPUTUSAN
DRS. LOURENS PATTIPEILOHY, M AP
Nip. 19640321 199302 1 005

PENGANTAR

Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tahun 2021 dapat selesai dengan baik.

Dari hasil-hasil program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tahun 2021 kita dapat mengetahui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dengan permasalahan yang ada.

Dengan adanya berbagai masalah dan tantangan serta peluang yang ada, maka di tahun 2022 kita dapat meningkatkan kualitas kinerja demi keberhasilan program-program

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dimasa yang akan datang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pikiran tenaga demi kelancaran pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Biak, 31 Pebruari 2022



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB. I PENDAHULUAN

| | |
|--|---|
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Gambaran Umum | 1 |
| C. Aspek Strategis Organisasi | 2 |
| D. Permasalahan Utama (Strategic Issued) Yang Sedang Di Hadapi Organisasi | 4 |

BAB, II PERENCANAAN KINERJA

| | |
|---|---|
| A. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021 | 6 |
| B. Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021..... | 7 |

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

| | |
|------------------------------------|----|
| A. Capaian Kinerja Organisasi..... | 10 |
| B. Realisasi Anggaran | 16 |

BAB. IV PENUTUP

| | |
|------------------------------------|----|
| A. Kesimpulan | 19 |
| B. Langkah -langkah ke Depan | 19 |

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program Keluarga Berencana, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan merupakan Program wajib yang harus dilaksanakan. Karena merupakan Misi Nasional yang dilimpahkan ke daerah untuk dimaksimalkan perannya sesuai situasi dan kondisi daerah masing-masing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Biak Numfor yang telah ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor dan Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor : 22 Tahun 2017 tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Sejalan dengan 9 (Sembilan) Agenda prioritas Pembangunan Nasional (NAWACITA), untuk Program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana melalui agenda Nawacita :

1. ke 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Ke-5. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia
3. Ke- 8. Melakukan Revolusi Karakter Bangsa. dengan mensinergikan program-program untuk mewujudkan terlaksananya agenda prioritas Nawacita tersebut.

RPJMD Kabupaten Biak Numfor periode 2019 s/d 2023 merupakan pelaksanaan dan penjabaran visi dan misi Bupati-Wakil Bupati Biak Numfor yaitu “**BIAK NUMFOR RELIGIUS, BERKARAKTER DAN BERBUDAYA SEBAGAI SUMBU PERTUMBUHAN YANG BERDAYA SAING MENUJU KESEJAHTERAAN DAN KEMANDIRIAN**”. Dari Visi dirumuskan 4 (empat) misi kerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumberdaya Manusia;
2. Meningkatkan Perekonomian Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berwibawa, Bersih dan Profesional, Berorientasi kepada Pelayanan Publik yang Prima;
4. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis yang Berwawasan Lingkungan dan Tata Ruang.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Biak Numfor sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Bupati Biak Numfor nomor : 22 Tahun 2017, merupakan leading sektor program/kegiatan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana, melalui visi yaitu “ Mewujudkan keluarga Berkualitas yang Religius, Berkarakter dan Berbudaya” dengan sebagai berikut :

- a) Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Kualitas hidup Perempuan dan Anak.
- b) Meningkatkan kuantitas dan kualitas Pelayanan Keluarga Berencana secara mandiri, Kesehatan Reproduksi dalam membangun Keluarga Sejahtera.
- c) Meningkatkan Kualitas Hidup dan kesejahteraan Keluarga.

B. Gambaran Umum

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor dan Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor : 22 Tahun 2017 tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, dan diberikan kewenangan dan tugas untuk melaksanakan program-program pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Kabupaten Biak Numfor. Program-program tersebut telah dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) DP3AKB Kabupaten Biak Numfor sebanyak 12 Program sebagai acuan dalam menyusun Rencana kerja (Renja). Program tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Program Peningkatan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja
- 5) Program Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran SKPD
- 6) Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
- 7) Program Perlindungan Perempuan
- 8) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- 9) Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
- 10) Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
- 11) Program Perlindungan Khusus Anak
- 12) Program Pengendalian Penduduk
- 13) Program Pembinaan Keluarga Berencana
- 14) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

C. Aspek Strategis Organisasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana diberikan kewenangan dan tugas untuk melaksanakan program-program pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Kabupaten Biak Numfor.

Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor : 22 Tahun 2017 tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, selain menjelaskan tugas dan fungsi tetapi juga menetapkan struktur organisasi yaitu :

Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
 - a). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b). Sub Bagian Program
 - c). Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pengarusutamaan Gender membawahi :
 - a) Seksi PUG, Sosial, Budaya dan Ekonomi
 - b) Seksi PUG, Pendidikan, Kesehatan, Politik dan Hukum
 - c) Seksi PUG, Pengembangan Kelembagaan dan Jejaring Kerja
4. Bidang Pemenuhan Hak, Perlindungan Perempuan dan Anak membawahi :
 - a) Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan
 - b) Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
 - c) Seksi Advokasi dan Pendampingan KDRT
5. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera membawahi :
 - a) Seksi Keluarga Berencana
 - b) Seksi Keluarga Sejahtera
 - c) Seksi Kesehatan Reproduksi
6. Bidang Data, Informasi dan Pengendalian Penduduk membawahi :
 - a). Seksi Pengendalian Penduduk
 - b). Seksi Informasi, Data dan Analisa program
 - c). Seksi Pengolahan Data Gender dan Partisipasi Masyarakat
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

- 1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga Berencana yang menjadi kewenanga daerah.
- 2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana

dipimpin oleh kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 3)

Bupati Biak Numfor melalui Sekretaris Daerah.

- 4) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga Berencana Mempunyai tugas membantu Bupati Biak Numfor menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah.
- 5) Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
 - a) Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan penyelenggara umum dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - d) Pelaksanaan ketatausahaan Dinas; dan
 - e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Biak Numfor sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dari Struktur Organisasi diatas ditempatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mampu melaksanakan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Sebanyak 36 Pegawai yang terdiri dari 30 ASN Struktural dan 6 orang tenaga Honorer serta adanya tenaga-tenaga lini lapangan seperti Kader PPKBD, Sub PPKBD, Kader Kelompok Kegiatan (poktan), Institusi, Lembaga, organisasi Masyarakat, Toga, Toma , Kelompok Kerja , dal lain-lain.

D. Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang sedang di Hadapi Organisasi

Secara umum Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan Keluarga Berencana telah terlaksana sekalipun masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena adanya masalah-masalah yang dihadapi organisasi.

Adapun Masalah-masalah yang dihadapi organisasi seperti :

- a. Belum Dilantiknya Kepala Dinas (Pejabat Eselon II), sementara pengendali organisasi ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt), hal ini berdampak pada terbatasnya kewenangan yang diberikan seperti pengambilan keputusan dan kebijakan.
- b. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi pada Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan mengalami kendala akibat dari tidak adanya alokasi anggaran untuk membiayai Program dan Kegiatan.

Dalam pelaksanaan Program dan kegiatan strategik Issued yang dihadapi organisasi adalah :

- a. Tingkat Kekerasan terhadap perempuan dan Anak masih sering terjadi
- b. Perlindungan terhadap Korban Kekerasan dalam rumah tangga masih kurang
- c. Tidak berjalannya kegiatan Kota, Sekolah dan kampung Ramah Anak
- d. Pembinaan terhadap organisasi dan Kelompok Usaha perempuan masih rendah
- e. Penyampaian Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Rendah
- f. TFR (Angka Kelahiran Total) 2,65% masih tinggi
- g. Angka Kelahiran Remaja umur 15 - 19 tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR 15 - 19 Age) masih pada angka 40/1000 Kelahiran
- h. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) TERHADAP pus masih rendah pada angka 17, 37 %
- i. Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi pada angka 28,15%

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam menentukan capaian kinerja organisasi maka buat perjanjian kinerja antara Bupati Kabupaten Biak Numfor dengan Kepala DP3AKB Kabupaten Biak Numfor.

Dibawah ini dilampirkan Salinan Perjanjian Kinerja tahun anggaran 2021 sbb :

A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Drs. Lourens Pattipeilohy, M.AP
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Biak Numfor

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

N a m a : HERRY A. NAAP, S.Si. M.Pd
Jabatan : BUPATI BIAK NUMFOR

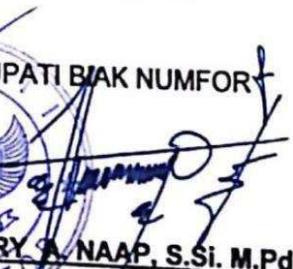
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Biak, 17 Februari 2021

PIHAK KEDUA

BUPATI BIAK NUMFOR

HERRY A. NAAP, S.Si. M.Pd

PIHAK PERTAMA

PLT. KEPALA DP3AKB. KAB. BIAK NUMFOR

DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
Drs. LOURENS PATTIREILOHY, M.AP
NIP. 19640321 199302 1 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA (PK)

PERJANJIAN KINERJA

**NAMA SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AKB)**

TAHUN : 2021

| N O | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN |
|-----|--|---|----------------------------|---|---------------|
| 1 | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan pada SKPD DP3AKB | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 371.995.424 |
| | | Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 Bulan | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 190.000.000 |
| | | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Bulan | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 25.999.624 |
| | | Jumlah Barang Cetak | 55000 lbr/15 bh | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 26.000.000 |
| | | Jumlah Pelaksanaan Koord.& Konsul. | 10 Kali | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi | 65.000.000 |
| | | Jumlah Kendaraan yang terpelihara | 4 Roda Empat/ 18 Roda 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional | 64.995.000 |
| 2 | Meningkatnya Pengaruh utama Gender dan Pemberdayaan Perempuan | | | Program Pengaruh utama Gender dan Pemberdayaan Perempuan | 50.500.000 |
| | | Jumlah sasaran kegiatan Peningkatan Kapasitas | 50 Orang, 3 Paket Hibah | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan | 550.489.800 |
| 2 | Meningkatnya capaian kinerja Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga | | | Program Pembinaan Keluarga Berencana | 6.653.935.600 |
| | | | | 1. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten /Kota | |
| | | Jumlah sasaran Remaja Calon Pengantin yang mendapat pemahaman Kesehatan Reproduksi dan Stanting | 1(Satu) Unit | * Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta Hak-hak Reproduksi di Fasilitas kegiatan dan Kelompok Kegiatan (Pemahaman Kespro dan Stanting bagi Calon Pengantin) Dak Non Fisik | 286.000.000 |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN |
|----|-------------------|--|--------------------------|---|---------------|
| | | Jumlah Faskes yang mendapat operasional pelayanan KB Bergerak | 57 Faskes | * Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Dak Non Fisik) | 188.205.000 |
| | | Jumlah Faskes sasaran distribusi Alat Kontrasepsi | 57 Faskes | * Operasional Distribusi Alkon (Dak Non Fisik) | 87.354.000 |
| | | Jumlah Pengadaan Obgyn Bed, IUD Kit dan Implant Removal Kit (Sarana Prasarana Pelayanan KB) | 57 Faskes | * Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB berupa Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan KB (Dak Fisik) | 313.014.600 |
| | | | | 2. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal | |
| | | Jumlah Ibu dan Keluarga yang mendapat pengasuhan 1000 HPK dan Stanting | 475 org/19 Distrik | * Advokasi Program KKBP kepada Stakeholder dan Mitra Kerja berupa Edukasi Pengasuhan 1000 HPK bagi ibu dan Keluarga (Dak Non Fisik) | 355.000.000 |
| | | Jumlah Media yang melakukan KIE | 3 Media | * Promosi dan KIE Program KKBP melalui Media Massa, Cetak dan Elektronik serta KIE Luar Ruang (Dak Non Fisik) | 221.862.000 |
| | | Jumlah Balai Penyuluhan KB yang melakukan pengelolaan dan sarana penyuluhan KKBP | 17 Balai KB/ 60 kegiatan | * Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBP berupa Operasional Balai Penyuluhan KB | 1.310.088.000 |
| | | Jumlah Pengadaan BKB Kit Stanting | 15 Unit | Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBP berupa: * Pengadaan BKB Kit Stanting (Dak Fisik Penugasan) | 293.400.000 |
| | | Jumlah Pengadaan Kit Siap Nikah Anti Stanting | 6 Unit | * Pengadaan Kit Siap Nikah Anti Stanting (Dak Fisik Penugasan) | 98.475.000 |
| | | | | 3. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB | |
| | | Jumlah Kader PPKBD dan Sub PPKBD yang melaksanakan Pembinaan dan Penyuluhan serta Pengumpulan Data | 813 Kader | * Pergerakan Kader Instansi Masyarakat Pedesaan berupa Operasional Pembinaan Program oleh Kader PPKBD/Sub PPKBD (Dak Non Fisik) | 1.286.400.000 |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN |
|----|-------------------|--|------------------------------|--|---------------|
| | | Jumlah Balai Penyuluhan KB yang di Rehap | 4 Balai KB | Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB berupa : Rehabilitasi Balai Penyuluhan KB (Dak Fisik) | 1.185.097.000 |
| | | | | 4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pembinaan Program KKBPK di Kampung KB | |
| | | Jumlah Kampung KB dan Jumlah Kegiatan | 20 Kamp KB / 3 Keg (60 Kali) | Pembinaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB | 1.029.040.000 |

Jumlah Anggaran untuk keseluruhan program baik Program Utama maupun Program Pendukung adalah :

| NO | PROGRAM | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|----|--|----------------------|-------------------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 371.995.424 | Dau |
| 2 | Program Pengaruhutamakan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | 550.499.800 | Dau |
| 3 | Program Pembinaan Keluarga Berencana | 6.653.936.000 | DAK Fisik dan Non Fisik |
| | Jumlah | 7.876.431.224 | |

PIHAK KEDUA

BUPATI BIAK NUMFOR

HERRY A. NAAP, S.Si. M.Pd

PIHAK PERTAMA

PLT. KEPALA DPAKB. KAB. BIAK NUMFOR

DRS. LOURENS PATTIREILOHY, M.AP
 NIP. 19640321 199302 1 005

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi.

Secara umum capaian kinerja organisasi dapat diukur dari rencana capaian kinerja dan Perjanjian kinerja dengan realisasi kinerja organisasi dan atau realisasi pelaksanaan program/ kegiatan sesuai dengan perjanjian kinerja. berikut analisis untuk setiap pernyataan sasaran strategis dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

2. Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2021

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara Bupati Kabupaten Biak Numfor dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), sesuai dengan target Alokasi Dana sebesar Rp. 7.876.431.224,- .dengan target kinerja 100%, dan apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun anggaran 2021 adalah :

Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021 memuat :

a. Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian Kinerja sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,
Berdasarkan Perjanjian Kinerja ditetapkan Pagu Dana sebesar Rp. 371.995.424,- dengan Target Capaian 100%, dan Realisasi sebesar Rp. 363.422.637,- atau sebesar 97,70%.
- Program Pengaruhutamakan Gender dan Pemberdayaan Perempuan,
Berdasarkan Perjanjian Kinerja ditetapkan Pagu Dana sebesar Rp. 550.499.800,- dengan Target Capaian 100%, dan Realisasi sebesar Rp. 550.499.800,- atau sebesar 100%.
- Program Peningkatan Kualitas Keluarga
Berdasarkan Perjanjian Kinerja ditetapkan Pagu Dana sebesar Rp. 300.000.000,- dengan Target Capaian 100%, dan Realisasi sebesar Rp 300.000.000,- atau sebesar 100%.
- Program Pembinaan Keluarga Berencana
Sesuai Perjanjian Kinerja ditetapkan Pagu Dana sebesar Rp. 6.653.936.000,- dengan Target Capaian 100%, dan Realisasi sebesar Rp. 6.624.844.109,- atau sebesar 99.56%.

Dari 4(Empat) Program sesuai dengan Perjanjian Kinerja sebesar Rp. 7.876.431.224,- atau target kinerja 100%, terlaksana (Realisasi) sebesar RP. 7.838.767.346 atau sebesar 99,52%.

10

Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DP3AKB Kabupaten Biak Numfor tahun 2021, diperoleh Capaian Kinerja dengan mengacu pada Target Kinerja yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) DP3AKB periode 2020 s/d 2024 adalah sebagai Berikut Daftar Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2021 sebagai Berikut :

Bidang Keluarga Berencana

| NO | Indikator Program prioritas | Satuan Indikator | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | KET. |
|----|---|-------------------|----------------|-------------------|------|
| | | | 2021 | 2021 | |
| 1 | Capaian Jumlah Peserta KB | Persen | 53,43% | 52,25% | |
| 2 | Capaian Faskes KB yang melakukan pelayanan KB | Jumlah Faskes KB | 60 | 60 | |
| 3 | Capaian Jumlah Kampung Keluarga Berencana | Jumlah Kampung KB | 24 | 20 | |
| 4 | Cakupan Jumlah pasangan Usia Subur (PUS) | Jumlah | 25.987 | 26.889 | |
| 5 | Capaian kelompok kegiatan Bina keluarga Balita(BKB) | Jumlah | 115 | 110 | |
| 6 | Capaian kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja(BKR) | Jumlah | 84 | 70 | |
| 7 | Capaian kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia(BKL) | Jumlah | 40 | 31 | |
| 8 | Capaian Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja | Jumlah | 24 | 20 | |
| 9 | Cakupan Jumlah Keluarga (KK) | Jumlah | 34.902 | 35.097 | |
| 10 | Cakupan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB | Jumlah Kampung | 24 | 20 | |
| 11 | Cakupan penerapan Model Siaga Kependudukan di Sekolah | Jumlah | 5 | 5 | |

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | satuan | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | KET. |
|----|---|--------|----------------|-------------------|------|
| | | | 2021 | 2021 | |
| 1 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | |
| 1 | Partisipasi Perempuan di lembaga Pemerintah | Persen | 40,33 | 37,45 % | |
| 2 | Porsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPR | Persen | 22 | 35% | |
| 3 | Partisipasi Perempuan di lembaga swasta | Persen | 30.16% | 30% | |
| 4 | Rasio KDRT | Rasio | 1,10% | 2.00% | |
| 5 | Partisipasi angkatan kerja perempuan | Persen | 81.15% | 80,79 % | |
| 6 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang melakukan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu | Persen | 35% | 35% | |
| 7 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu melaksanakan Ktp/A /PKT di rumah sakit | Persen | 32.40% | 32% | |
| 8 | Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam unit pelayanan terpadu | Persen | 21.72% | 21,01 % | |
| 9 | Cakupan penegakan hukum dan tingkat pendidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | Persen | 44.07% | 42,12 % | |
| 10 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum | Persen | 16.17% | 13,10 % | |
| 11 | Rasio APM Perempuan/laki-laki SD | rasio | 97,34% | 97.00% | |
| 12 | Rasio APM Perempuan/laki-laki SMP | rasio | 97,00% | 96.00% | |
| 13 | Rasio APM Perempuan/laki-laki SMA | rasio | 95,00% | 94.00% | |
| 14 | Rasio APM Perempuan/laki-laki Perguruan Tinggi | rasio | 95,00% | 94.00% | |

3. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Capaian Kinerja Tahun 2016 s/d 2020 sebagai berikut :

Realisasi capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Biak Numfor sesuai dengan alokasi Anggaran dengan perbandingan Realisasi dan persentase capaian kinerja selama 5(lima) Tahun terakhir (dari Tahun 2016 s/d 2020) sebagaimana daftar rincian dibawah ini sebagai berikut :

Daftar Lampiran Realisasi dan Persentase capaian kinerja DP3AKB Kabupaten Biak Numfor dari Tahun 2016 s/d 2020, sbb :

| NO | TAHUN | SUMBER DANA | JUMLAH DANA | REALISASI | % |
|----|-------|--------------------|---------------|---------------|--------|
| 1 | 2016 | DAU, DAK DAN OTSUS | 5.659.420.000 | 4.417.543.785 | 78,06% |
| 2 | 2017 | DAU, DAK DAN OTSUS | 3.507.630.000 | 3.260.209.126 | 92,95% |
| 3 | 2018 | DAU, DAK DAN OTSUS | 7.738.911.000 | 6.776.002.834 | 87,56% |
| 4 | 2019 | DAU DAN DAK | 9.834.713.000 | 8.670.448.496 | 88,16% |
| 5 | 2020 | DAU DAN DAK | 7.381.674.000 | 7.341.179.926 | 99,45% |
| 6 | 2021 | DAU DAN DAK | 7.876.431.224 | 7.838.767.346 | 99,52% |

Dari daftar diatas capaian kinerja DP3AKB selama 5(lima) tahun terakhir ada peningkatan capaian yaitu sebesar 99,52%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis.

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) DP3AKB periode 2020 s/d 2024 , maka untuk tahun 2021 direncanakan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.438.500.000,- untuk membiayai beberapa Program dengan target kinerja 100%. Apabila dibandingkan dengan Alokasi Anggaran DP3AKB sebesar Rp. 7.876.431.224,- atau target kinerja 100%, terlaksana (Realisasi) sebesar RP. 7.838.767.346 atau sebesar 99,52%., maka dapat disimpulkan bahwa Jumlah Target Renstra sebesar Rp. 8.438.500.000,- dengan Realisasi sebesar Rp. 7.838.767.346 , - atau sebesar 92,89%.

5. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2021 dengan Standar Nasional, DP3AKB Kabupaten Biak Numfor untuk tahun 2021, tidak secara detail memaparkan target standard Nasional jadi tidak dapat di ukur perbandingan dengan realisasi kinerja tahun 2021.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan dan Penurunan serta alternatif solusi yang telah dilakukan :

a. Tingkat Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja.

13

.Dari Analisa diatas bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi serta Program/kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan keluarga Berencana telah berjalan/terlaksana sebagaimana yang diharapkan, persentase menunjukkan bahwa ada peningkatan capaian kegiatan pada angka 99,52%, hal ini juga didukung oleh ASN yang memiliki Kompetensi baik structural, fungsional , tenaga lini lapangan, Kader-kader, mitra kerja Toga, Toma , organisasi/Lembaga formal/informal maupun adanya dukungan dari masyarakat.

b. Tingkat Kegagalan atau Penurunan.

Pada prinsipnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program/kegiatan tidak terlepas dari kendala-kendala yang dialami hal berdampak pada penurunan atau adanya kegagalan seperti pada pelaksanaan program/kegiatan pada Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dimana tahun 2021 tidak didukung oleh Dana atau alokasi Anggaran yang terbatas . Hal ini berdampak pada lemahnya kinerja atau menurunnya kinerja pada bidang tersebut.

c. Alternatif solusi yang diambil.

Alternatif dari penurunan kinerja pada bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah dengan mengambil kebijakan dimana dalam pelaksanaan program/kegiatan memanfaatkan Anggaran yang ada pada DP3AKB dengan mensinergikan kegiatan-kegiatan pada program Keluarga Berencana. 7.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana didukung sumber daya yang ada.seperti :

a. Sumber Daya Manusia

Aspek Sumber Daya Manusia sangat menentukan berjalannya suatu organisasi. Bahwa DP3AKB ditempatkan ASN yang memiliki Kompetensi dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Berikut Jumlah ASN berdasarkan Jabatan, Pendidikan dan Kepangkatan adalah sebagai berikut :

Berikut Jumlah Pegawai DP3AKB Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Jabatan, Pendidikan dan Kepangkatan :

Jumlah Pegawai (ASN) berdasarkan Jabatan :

| NO | JABATAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|----|------------|----------|------------|
| 1 | Eselon II | 0 | |
| 2 | Eselon III | 6 Orang | |
| 3 | Eselon IV | 14 Orang | |
| 4 | Staff | 10 Orang | |

| | | | |
|---|-------------------------------|----------|---------------------------------|
| 5 | Tenaga Fungsional Penyuluh KB | 11 Orang | ASN Vertikal yang diperbantukan |
| 6 | Tenaga Honorer | 6 Orang | |
| | Jumlah | 47 Orang | |

Jumlah Pegawai (ASN) berdasarkan Pangkat,Ruang,Golongan :

| NO | JABATAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|----|---------------------------|----------|------------|
| 1 | Golongan IV | 2 Orang | |
| 2 | Golongan III | 20 Orang | |
| 3 | Golongan II | 8 Orang | |
| 4 | Golongan I / Non Golongan | 6 Orang | |
| | Jumlah | 47 Orang | |

Jumlah Pegawai (ASN) berdasarkan Tingkat Pendidikan :

| NO | TINGKAT PENDIDIKAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|----|---------------------|----------|------------|
| 1 | Strata II (S.II) | 4 Orang | |
| 2 | Strata I (S.I) | 23 Orang | |
| 3 | Diploma III (D.III) | 3 Orang | |
| 4 | SLTA | 17 Orang | |
| | Jumlah | 47 Orang | |

Disamping ASN (Pegawai) yang melaksanakan tugas dan fungsi,, Program dan Kegiatan, adanya tenaga lini lapangan yang membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti kader-kader PPKBD, Sub PPKBD, Kader Kelompok Kegiatan, Kelompok Kerja, organisasi, institusi , Lembaga terkait , Toga, Toma serta masyarakat.

b. Sumber Daya Lainnya.

Sumber Daya lainnya seperti :Kondisi Wilayah, Sarana dan Prasarana Pendukung (Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua, , Bangunan (Kantor dan Balai Penyuluhan), Faskes KB, dan lain-lain.

8. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

a. Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Bahwa capaian kinerja organisasi tidak terlepas pelaksanaan Program /Kegiatan. DP3AKB tahun 2021 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) T.A. 2021 ada 4(Empat) Program yang mendapat alokasi Anggaran dan penunjang keberhasilan capaian kinerja organisasi yaitu :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,

Berdasarkan Perjanjian Kinerja ditetapkan Pagu Dana sebesar Rp. 371.995.424,- dengan Target Capaian 100%, dan Realisasi sebesar Rp. 363.422.637,- atau sebesar 97,70%.

- Program Pengaruhutamakan Gender dan Pemberdayaan Perempuan,

15

Berdasarkan Perjanjian Kinerja ditetapkan Pagu Dana sebesar Rp. 550.499.800,- dengan Target Capaian 100%, dan Realisasi sebesar Rp. 550.499.800,- atau sebesar 100%.

- Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Berdasarkan Perjanjian Kinerja ditetapkan Pagu Dana sebesar Rp. 300.000.000,- dengan Target Capaian 100%, dan Realisasi sebesar Rp 300.000.000,- atau sebesar 100%.

- Program Pembinaan Keluarga Berencana

Sesuai Perjanjian Kinerja ditetapkan Pagu Dana sebesar Rp. 6.653.936.000,- dengan Target Capaian 100%, dan Realisasi sebesar Rp. 6.624.844.109,- atau sebesar 99.56%.

b. Program/Kegiatan Penunjang Kegagalan Pencapaian Kinerja.

Sesuai dengan Rencana strategis (Renstra) DP3AKB periode 2020 s/d 2024 ada 13 program yang direncanakan, tetapi hanya 4 program yang mendapat alokasi anggaran, sementara 9 program tidak mendapat alokasi anggaran, dan ini yang menghambat capaian kinerja. terutama program-program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sama sekali tidak mendapat alokasi anggaran dan ini yang menyebabkan kegagalan capaian kinerja organisasi, Kegiatan-kegiatan tersebut otomatis tidak dapat dijalankan secara maksimal.

B. Realisasi Anggaran

Berikut Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan DP3AKB tahun anggaran 2021 dalam mewujudkan capaian kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

REALISASI ANGGARAN

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA,
TAHUN ANGGARAN 2021**

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | CAPAIAN |
|-----------|--|-------------------------|-------------------------|----------------|
| | URUSAN WAJIB | 7.876.431.224,00 | 7.838.767.346,00 | 99,52% |
| | Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 7.876.431.224,00 | 7.838.767.346,00 | 99,52% |

| | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 371.995.424 | 363.422.637 | 97,70% |
| | 1. Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| | * Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 26.000.000 | 26.000.000 | 100% |
| | * Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi | 65.000.000 | 65.000.000 | 100% |
| | 2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| | * Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Lintrik | 25.999.624 | 17.427.637 | 67,03% |
| | * Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 190.000.000 | 190.000.000 | 100% |
| | 3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah | | | |
| | * Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional | 64.995.800 | 64.995.000 | 100% |
| 2 | Program Pengaruhutama Gender dan Pemberdayaan Perempuan | 550.499.800 | 550.499.800 | 100% |
| | * Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan | 50.499.800 | 50.499.800 | 100% |
| | * Darma Wanita Persatuan (DPW) Hibah | 300.000.000 | 300.000.000 | 100% |
| | * Gatriwara (Hibah | 200.000.000 | 200.000.000 | 100% |
| 3 | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | 300.000.000 | 300.000.000 | 100% |
| | * Penyediaan Layanan Bagi Keluarga Dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Yang Wilaya Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten Kota Untuk KPA. Hibah | 300.000.000 | 300.000.000 | 100% |
| 4 | Program Pembinaan Keluarga Berencana | 6.653.936.000 | 6.624.844.109 | 99,56% |
| | 1. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten /Kota | | | |
| | * Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta Hak-hak Reproduksi di Fasilitas kegiatan dan Kelompok Kegiatan (Pemahaman Kespro dan Stanting bagi Calon Pengantin) Dak Non Fisik | 286.000.000 | 286.000.000 | 100% |
| | * Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Dak Non Fisik) | 188.205.000 | 188.205.000 | 100% |
| | * Operasional Distribusi Alkon (Dak Non Fisik) | 87.354.000 | 87.000.000 | 99,59% |
| | * Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB berupa Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan KB (Dak Fisik) | 298.109.000 | 298.109.000 | 100% |
| | * Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB berupa Penunjang Dak Fisik Regurer | 74.905.600 | 74.905.600 | 100% |

| | | | | |
|--|--|---------------|---------------|--------|
| | 2. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal | | | |
| | * Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja berupa Edukasi Pengasuhan 1000 HPK bagi ibu dan Keluarga (Dak Non Fisik) | 355.000.000 | 330.000.000 | 92,96% |
| | * Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa, Cetak dan Elektronik serta KIE Luar Ruang (Dak Non Fisik) | 221.862.000 | 221.862.000 | 100% |
| | * Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK berupa Operasional Balai Penyuluhan KB | 1.310.088.000 | 1.307.447.959 | 99,80% |
| | Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK berupa : | | | |
| | * Pengadaan BKB Kit Stanting (Dak Fisik Penugasan) | 292.500.000 | 292.500.000 | 100% |
| | *. Pengadaan Kit Siap Nikah Anti Stanting (Dak Fisik Penugasan) | 97.878.450 | 97.878.000 | 100% |
| | * Penunjang Dak Fisik Penugasan | 1.496.550 | 1.496.550 | 100% |
| | 3. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB | | | |
| | * Pergerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan berupa Operasional Pembinaan Program oleh Kader PPKBD/Sub PPKBD (Dak Non Fisik) | 1.286.400.000 | 1.286.400.000 | 100% |
| | * Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB berupa : * Rehabilitasi Balai Penyuluhan KB (Dak Fisik) | 1.125.097.400 | 1.124.000.000 | 99,90% |
| | 4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pembinaan Program KKBPK di Kampung KB | | | |
| | * Pembinaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB | 1.029.040.000 | 1.029.040.000 | 100% |

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

- Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana diberi Tugas dan Fungsi membantu Bupati Biak Numfor untuk menangani urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- Target Kinerja DP3AKB ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Bupati Biak Numfor dengan Kepala DP3AKB. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.876.431.224,- terlaksana (Realisasi) sebesar RP. 7.838.767.346 atau sebesar 99,52%.,
- Capaian (realisasi) Kinerja organisasi telah dijelaskan diatas berdasarkan target kinerja pada Rencana Strategis (Renstra) DP3AKB periode 2020 s/d 2024, yaitu Target Renstra sebesar Rp. 8.438.500.000,- dengan Realisasi sebesar Rp. 7.838.767.346 , - atau sebesar 92,89%.
- Ada beberapa program pada Renstra yang tidak berjalan maksimal akibat dari tidak adanya alokasi anggaran khususnya program-program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

B. Langkah - Langkah ke depan

- *. Bahwa Program Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Nasional adalah merupakan Program Prioritas Nasional, dan salah satu Badan/Lembaga yang menangani peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia (SDM) melalui Keluarga dengan sasaran terciptanya Keluarga yang berkualitas. Diharapkan DP3AKB dapat meningkatkan kinerja agar output dan outcome dapat diukur.
- * Untuk meningkatkan capaian kinerja organisasi perlu dukungan dari berbagai pihak, Stake Holder, Koordinasi dengan Lembaga/institusi terkait baik formal maupun non formal terutama dukungan dan peran serta masyarakat.
- *. Diharapkan adanya alokasi anggaran pada program-program prioritas seperti Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar capaian kinerja organisasi dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan.

